

Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota *Onder Afdeling* Rawas Tahun 1901-1942

Agus Susilo, Sarkowi

Prodi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial, STKIP PGRI Lubuklinggau

Abstrak

Sejarah Surulangun sebagai ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942 merupakan bagian dari sejarah lokal Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat sekarang ini sejarah lokal Surulangun kurang mendapat perhatian bagi generasi muda. Padahal perihal tersebut harus pahami dan dipelajari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejarah Surulangun sebagai ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942. Metode penelitian menggunakan metode sejarah dengan teknik pengambilan sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan pada masa penjajahan Belanda, Onder Afdeling Rawas yang ibukota berada di Surulangun, secara toponimi berdekatan dengan wilayah Bengkulu dan Jambi. Selain daerah yang strategis untuk memerintah, Onder Afdeling Rawas juga mempunyai berbagai kekayaan alam yang menjadi penopang kepemimpinan kolonial Belanda. Ketika terjadi perang kemerdekaan oleh para pejuang Indonesia di Palembang dan sekitarnya melawan Belanda, Onder Afdeling Rawas menjadi wilayah tujuan pelarian pejuang Indonesia. Wilayah Pulau Kidak, menjadi pelarian pejuang Indonesia dari Curup, begitu pun Lubuklinggau, Lahat dan lainnya. Pulau Kidak dipilih sebagai pelarian pejuang bangsa, oleh sebab daerahnya lebih dekat dengan daerah sebelumnya. Selain itu, terdapat pula pejuang Nasional yang berasal dari daerah ini. Berbagai strategi perjuangan dilakukan untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang sejati. Pada akhirnya perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dapat diraih.

Kata Kunci: Surulangun, *Onder Afdeling*, Rawas

Pendahuluan

Sumatera, pulau yang terletak di bagian barat wilayah Indonesia, menyimpan bukti peradaban masa lalu. Posisi pulau ini strategis dalam hubungan dengan pusat-pusat peradaban di Asia, terutama Cina dan India. Pada bagian Utara pulau ini terletak Teluk Benggala yang menghubungkan pulau Sumatera dengan India Selatan. Bagian barat pulau Sumatera berhadapan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Selat Malaka, dan di sebelah Selatan dengan Selat Sunda. Pantai Sumatera yang panjang, meliputi pantai timur dan pantai barat yang dipisahkan oleh serangkaian pegunungan

bukit Barisan pada bagian tengah pulau. Kedua pantai ini memiliki kondisi geografis yang berbeda. Pantai timur merupakan pantai yang lebar dan luas. Sebagian lahan terbentuk oleh endapan aluvial di bagian baratnya seperti yang ditemukan di pesisir Jambi dan Sumatera Selatan (Hendrata, 2013). Dalam peta sejarah Indonesia, Sumatera Selatan memiliki akar sejarah yang panjang. Berdasarkan penemuan benda-benda peninggalan sejarah di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lain, dapat diketahui bahwa wilayah ini telah muncul dua bentuk pemerintahan dan kekuasaan yang paling menonjol, yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-13 dan Kesultanan Palembang

Darussalam abad ke-17-19. Periode ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan dunia pelayaran dan perdagangan. Oleh sebab Kesultanan Palembang Darussalam telah menjalin kerja sama dengan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada 1642.

Sejak saat itu awal terjadinya hubungan perdagangan lada dan timah antara Palembang dan Batavia didasarkan atas perjanjian yang disetujui bersama. Sekaligus sebagai awal ketertarikan bangsa Belanda untuk menguasai Sumatera Selatan. Hubungan dagang antara Kesultanan Palembang Darussalam dan Belanda mengalami pasang surut dan berakhir pada abad ke-18, yang ditandai dengan dibubarkannya VOC tahun 1799 (Supriyanto, 2013). Surulangun sebagai wilayah yang berada di kawasan Sumatera Selatan masa kolonial merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

Begitu pun dengan perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial yang merupakan deretan sejarah dari generasi ke generasi berikutnya yang tidak pernah dapat dipadamkan, meskipun mengalami pasang surut dengan kadar yang berbeda-beda (Nain, 2011). Sikap penjajahan Belanda yang semena-mena dan menysangsarakan nasib rakyat Indonesia umumnya, telah menimbulkan gejolak ingin memerdekakan wilayah Indonesia dari tangan penjajah Barat yang sudah lama

menyakiti rakyat Indonesia. Tentunya sikap ini juga dimiliki oleh rakyat daerah *Onder Afdeling* Rawas (OAR) yang berpusat di Surulangun. Demi meraih cita-cita persatuan dan kesejahteraan, rakyat daerah ini memiliki memori yang belum banyak diungkap oleh para sejarawan. Sehingga kesadaran dan tanggung jawab ini dapat direkonstruksi apabila bisa mempelajari perjalanan bangsa dengan sebaik-baiknya, meniru dan mengembangkan pola pikir serta tindakan yang baik.

Maka semangat perjuangan yang berkobar menginginkan negeri yang makmur dan jauh dari ancaman penjajahan asing (Lentera Abadi, 2009). Secara geografis wilayah ini merupakan bagian paling barat di provinsi Sumatera Selatan sekarang ini. Jika di telaah secara kewilayahan dan berdasarkan analisa arkeologis pelayaran zaman kuno dan madya, maka daerah ini termasuk bagian paling hulu dari pusat pemerintahan yang bercorak maritim.

Artinya, untuk menjangkau daerah seperti itu membutuhkan waktu pelayaran sungai yang cukup lama. Meskipun demikian, Surulangun tetap menjadi sasaran kolonial Belanda secara langsung. Terbukti dengan dijadikan Surulangun sebagai bagian dari daerah administrasi pemerintahan Keresidenan Belanda di Palembang. Dengan menempatkan Surulangun sebagai ibu kota *Onder Afdeling*

Rawas yang dikepalai seorang *Controleur* atau Kontelir dari bangsa Belanda sejak tahun 1901. Bangsa Belanda memilih dirinya sendiri dalam memimpin wilayah jajahan untuk mengkoordinir wilayah dibawahnya. Surulangun sebelum berada di bawah kekuasaan Keresidenan Palembang dari pemerintahan Belanda merupakan wilayah terluar di bagian barat dari kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam, yang biasa disebut daerah uluan, yakni taklukan dalam pengertian denotative.

Namun sebenarnya merupakan daerah yang memiliki kekuatan-kekuatan yang otonom dan tetap merdeka. Palembang sebagai daerah pusat hanya butuh sebuah pengakuan dari daerah-daerah uluan (Santun, Murni & Supriyanto, 2010). Sehingga daerah ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku dalam wilayah uluan Kesultanan Palembang Darussalam.

Namun setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda, secara bertahap wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Palembang Darussalam diperintah oleh kolonial Belanda di bawah wilayah administratif Keresidenan Palembang. Pada masa 50 tahun sebelumnya, penetapan wilayah *Afdeling* berdasarkan pintu-pintu gerbang atau tempat pengawasan strategis pada jalur sungai. Sejak tahun 1901 dilakukan perubahan berdasarkan jenjang geografis.

Terhitung dari pantai Timur (wilayah pantai) masuk ke pedalaman arah Barat, yaitu wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah-wilayah bawahan *Afdeling* biasa disebut *Onder Afdeling*. Jumlah seluruh wilayah *Onder Afdeling* dari ketiga *Afdeling* adalah 14 *Onder Afdeling*. Setiap *Onder Afdeling* dikepalai oleh seorang *Amtenaar* berkebangsaan Belanda yang disebut *Controleur* (pengawas).

Tugas *Controleur* tentu mengawasi pemerintahan dibawahnya dengan dibantu orang-orang terpercaya baik dari Belanda sendiri maupun bangsawan Indonesia sendiri (Suwandi, 2010). Keadaan geografis pedusunan atau perkotaan di *Onder Afdeling* Rawas pada dasarnya mengenai lapisan-lapisan sosial atau strata social, seperti yang terdapat di daerah lain. Sehingga ketika akan selalu ada dan terus ada sepanjang masyarakat itu mengenal adanya sesuatu yang dihargai.

Oleh karena itu, di daerah pedusunan pada umumnya dalam masyarakat petani tradisional mengenal dua macam golongan petani, yakni golongan pemilik tanah/kebun dan golongan penggarap tanah (buruh tani). Itu sebabnya dasar kehidupan masyarakat pedusunan hampir semua bercocok tanam, terutama bersawah dan berlandang. Sumber daya alam yang erat hubungannya dengan keadaan letak wilayah, iklim dan tanah yang menjadi unsur penting dalam menentukan mata pencaharian penduduk.

Sebagian besar hidup bercocok tanam dan hutan dengan segala isinya, serta sungai beserta lebak lebung termasuk faktor penunjang yang dianggap sebagai hasil nilai tambah. Perkebunan karet menjadi perkebunan masyarakat di wilayah *Onder Afdeling* Rawas yang mengalami kemakmuran sejak zaman Hindia Belanda. Di mana penduduk oleh pemerintah untuk membuat perkebunan karet dan kelapa sawit dengan diberi insentif.

Pada zaman revolusi kemerdekaan, produksi karet di *Onder Afdeling* Rawas tidak hanya merupakan mata pencaharian penduduk. Tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang pernah memegang peranan penting untuk membiayai perjuangan pada waktu itu. Sejak pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai Kota Palembang, yang letaknya strategis sebagai jalur perdagangan antar pulau di Sumatera, sistem Kesultanan dirubah menjadi Karesidenan Palembang.

Karesidenan Palembang dibagi atas beberapa *Afdeling*, yang masing-masing dikepalai Asisten Residen. Setiap *Afdeling* dibagi atas beberapa *Onder afdeling*, yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Controleur* dengan membawahi beberapa distrik yang dikepalai oleh *Asisten Demang*. Kota Palembang terdiri atas dua distrik, yaitu Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu, yang dipisahkan oleh aliran Sungai Musi. Seperti halnya pedalaman, masing-masing distrik terdiri atas

Onderdistrik, yaitu *Onderdistrik* Palembang Ilir Barat dan *Onderdistrik* Palembang Ilir Timur, yang langsung membawahi beberapa kampung atau *wijk*. Keresidenan (*regentschappen*) adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah Propinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia sampai tahun 1950-an (Safitri, 2017).

Pemerintah Kolonial Belanda yang menguasai Nusantara yang berpusat di Batavia pada tahun 1900. Dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan Gubernur Jenderal yang menjadi kepala suatu hirarki administrasi dan mempunyai cabang-cabangnya di distrik setempat. Gubernur Jenderal yang menjadi kepala pemerintahan Hindia Belanda diangkat oleh Mahkota Kerajaan atas usul dari Menteri jajahan. Pemerintah kolonial Belanda menguasai rakyat Indonesia dengan cara pemerintahan tidak langsung.

Belanda hanya bertindak sebagai penasehat, yang tugas kepemimpinannya dijalankan oleh Pamong orang Indonesia yang bertugas di dalam pola hirarki tradisional (Van Niel, 2009). Dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau sekarang, ketika zaman penjajahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1901 sampai tahun 1930-an, hanya ada 2 (dua) yang berstatus Kota. Hal ini pun yang dimaksud Kota kelas III, yaitu Kota *Onder Afdeling* Musi Ulu di Muara Beliti dan Kota *Onder Afdeling* Rawas di Surulangun. Daerah lain yang berada di dalam wilayah

Onder Afdeling hanya merupakan Dusun-dusun diantaranya ada yang berstatus Dusun Marga SKI, namun masih tetap sebagai Dusun (Suwandi, 2010). Dalam perkembangan selanjutnya, memasuki tahun 1870 dalam sejarah kolonial dikenal sebagai zaman liberal.

Di tandai dengan ditetapkan Undang-undang Agraria yang berisi larangan mengambil tanah penduduk dan membebaskan para pengusaha asing untuk menyewa tanah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan sebagai upaya tindakan preventif bagi timbulnya kekuasaan merampas hak milik atas tanah sewenang-wenang, sekaligus merupakan awal lahirnya ide *humaniter*. Selain itu, ditetapkan pula bahwa tanah yang dibiarkan menganggur tanpa ditanami atau tidak digarap secara konstitusi adalah milik negara.

Banyak penguasa setempat mengikuti peraturan bangsa Kolonial Belanda. Dengan merampas beberapa tanah milik rakyat untuk memajukan perekonomian kolonial Belanda. Kolonial Belanda memang tidak turun sendiri, namun peran penguasa lokal sudah sangat membuat bangsa Indonesia menderita yang sangat dalam (Ahmadin, 2008). Tujuan penulisan artikel untuk menjelaskan sejarah Surulangun sebagai Ibukota *Onder Afdeling* Rawas pada 1901-1942.

Tinjauan Pustaka

A. Kota-Kota Kolonial Belanda

Kota-kota kolonial muncul ditandai dengan kelengkapan perkantoran dan benteng sebagai pelindung dari dunia luar. Kota Kolonial ini banyak berdiri di Hindia Belanda dengan kekuasaan pusat berada di Batavia. Untuk daerah-daerah kekuasaan Belanda yang berada di luar Batavia dan tanah Jawa, berdiri Keresidenan dan wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh seorang Residen Belanda ditingkat Kota besar, dan *Conteleur* ditingkat Kota Kabupaten. Selain itu, kota-kota karesidenan di zaman sebelum perang banyak menunjukkan aktivitas sosial dan kultural yang menandainya sebagai sebuah kota kolonial (Makkelo, 2017).

Menurut Koentjaraningrat (dalam Prastiwi, 2019), menjelaskan hadirnya orang Belanda di Indonesia yang kemudian menjadi penguasa telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat pribumi, termasuk segi kebudayaan beserta hasil-hasilnya. Pencampuran gaya hidup Belanda dengan pribumi, khususnya Jawa disebut sebagai gaya hidup Indis. Budaya Indis kemudian ikut mempengaruhi gaya hidup masyarakat Hindia-Belanda, melalui jalur formal. Misalnya, melalui media pendidikan, hubungan pekerjaan, perdagangan, dan sebagainya. Selain gaya hidup dengan berbagai aspek, bangunan rumah tinggal mendapat perhatian dalam perkembangan budaya Indis. Karena

rumah tempat tinggal merupakan ajang sehari-hari. Pemerintah kota adalah sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pemerintahan di tingkat kota secara otonom. Pemerintah kota baru dibentuk pada akhir masa Kolonial Belanda, yaitu awal abad XX pasca Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903. Pada masa pra kolonial kota-kota di Indonesia masih berstatus sebagai ibu kota pemerintah, dan tempat kedudukan kepala pemerintahan tertinggi setempat.

Pada pemerintahan Kerajaan, tempat kedudukan raja di ibu kota Kerajaan. Jenjang atau struktur pemerintahan kolonial di Indonesia pada prinsipnya seperti struktur pemerintahan tradisional yang telah ada sebelumnya. Mengacu struktur pemerintahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda ternyata memanfaatkan kota-kota yang ada sebelumnya sebagai ibu kota pemerintahan yang telah dibentuk. Mereka hanya memanfaatkan kota yang telah ada, dan periode berikutnya mereka meningkatkan dan membangun kota tersebut menjadi lebih sempurna (Basundoro, 2012).

Pada masa penjajahan Belanda, kota-kota Kolonial Belanda di Indonesia mengalami gaya ke barat-baratan dari berbagai segi kehidupan. Percampuran antara budaya barat dengan masyarakat lokal berkenaan dengan fungsi komersil. Surulangun yang memiliki potensi sebagai kota *Onder Afdeling* Rawas, setelah dilihat

potensi dan wilayah strategis sangat menguntungkan pihak kolonial. Status Surulangun sebagai kota *Onder Afdeling* Rawas, merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Belanda di Keresidenan Belanda (Syuhada, 2017). Gambaran Surulangun yang dijadikan pusat pemerintahan *Onder Afdeling Rawas* adalah pemukiman baru. Pemukiman yang dibuka oleh Belanda dan masyarakat setempat yang dikenal dengan Pasar Surulangun.

Sebelah timur adalah tempat pemukiman masyarakat, dan ke arah timur lagi berbatasan dengan Desa Lesung Batu, sebelah selatan adalah Sungai Rawas dan Dusun Surulangun lama yang dipisahkan oleh batang hari Sungai Rawas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Baung dan di utara menuju ke arah Sarolangun Jambi. Surulangun sebagaimana kawasan Sumatera bagian selatan lain, merupakan wilayah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim barat dan timur.

Keberadaannya di pinggir Sungai Rawas yang dikenal cukup subur. Oleh karena berada di daerah aliran sungai yang ke arah hulu sungainya membentuk bagian dari Bukit Barisan. Sekarang ini dikenal sebagai bagian dari daerah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sungai tersebut mengalir di bagian barat provinsi Sumatera Selatan yang beriklim hutan hujan tropis. Suhu rata-rata setahun sekitar 23 °C. Bulan terpanas adalah Oktober, dengan suhu rata-rata 24 °C, dan suhu terdingin terjadi

pada bulan Juni, yaitu sekitar 22 °C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3546 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, dengan rata-rata 482 mm, dan curah hujan terendah pada bulan Juni, rata-rata 115 mm. Sungai-sungai di Sumatera, sebagaimana gunung-gunung apinya, merupakan elemen yang kreatif di pulau tersebut. Daratan bagian timur yang luas hampir seluruhnya terbentuk oleh muatan tanah endapan. Perlahan tapi pasti bertambah oleh berbagai aktivitas alam yang berkelanjutan. Sungai-sungai di Sumatera juga kaya akan lumpur dan endapan serta, memiliki curah hujan yang tinggi di Sumatera. Sungai kecil tersebut mempunyai karakteristik yang serupa dengan sungai di pulau yang lebih kecil.

Di bagian barat mengapit pulau yang landai, tertutup di antara rangkaian gunung dan garis pantai yang memagarinya, sungai-sungai ini tergolong pendek dan deras dan jarang dapat di deteksi. Sungai-sungai di pembatas air di bagian Timur mengalir melalui daratan berlumpur yang luas, membasahi pegunungan dengan airnya, arusnya juga luar biasa, namun memiliki banyak rintangan yang membuatnya tidak mudah dijadikan sebagai pelabuhan atau pendaratan (Cabaton, 2015).

B. Peralihan Kesultanan Palembang Menjadi Wilayah Kolonial Belanda

Pada masa awal pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Palembang,

masih mempertahankan dan memberdayakan susunan pemerintahan tradisional masa itu. Pasca Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan tahun 1825, Belanda mengangkat J. L. Van Sevenhoven sebagai Residen Pertama di Palembang (1825) dan Belanda mengangkat juga (Menantu Sultan Mahmud Badaruddin II) Pangeran Kramo Jayo Sebagai Perdana Menteri tahun 1838. Para penguasa Tradisional (elite lokal) yang mau diajak kerjasama atau menyatakan setia kepada Belanda, diangkat menjadi aparat pemerintahan Belanda.

Selanjutnya diberikan pangkat dan jabatan tertentu, misalnya Pangeran, Ranga, Demang, Pasirah, atau Kapiten Cina (pangkat militer Tituler). Selain itu, untuk melengkapi alat pemerintahan Belanda di Palembang dan daerah Uluu, maka tiap-tiap kelompok etnis diangkat seorang pimpinan untuk mewakili golongannya dengan memakai pangkat-pangkat militer Tituler.

Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Palembang (Panji, 2015). Jatuhnya Kesultanan Palembang Darussalam terhadap imperialisme Belanda, berpengaruh terhadap suasana politik. Rencana Belanda dengan politik *divide ed impera* yang selama ini digagas mampu memberikan hasil yang positif dengan tumbangannya kekuasaan Kesultanan Palembang yang kaya sumber daya alam.

Belanda setelah menguasai Kesultanan Palembang, menawan dan mengasingkan Sultan Mahmud Badaruddin II ke wilayah kekuasaan Belanda di pulau Ternate. Untuk wilayah Kesultanan Palembang sendiri oleh Belanda, dirubah status pemerintahan menjadi wilayah Karesidenan yang dipimpin seorang Residen dari kalangan Kolonial Belanda.

Selanjutnya, masyarakat di wilayah kekuasaan Belanda di Sumatera Selatan banyak hidup berdekatan dengan aliran sungai yang deras sebagai penyambung hidupnya. Pola interaksi dapat dilihat dari hubungan kerjasama dalam melaksanakan aktivitas mencari ikan, serta melakukan kontak secara bersama, baik nelayan dengan nelayan maupun interaksi dengan masyarakat lain (Irwansyah & Susilo, 2018).

Sejak tahun 1825, kota ini berubah statusnya mejadi daerah karesidenan yang dipimpin seorang Residen. Karesidenan Palembang dibagi atas beberapa *Afdeling* kecuali Ibukota Palembang. Masing-masing *Afdeling* dikepalai seorang *Asisten Residen*. Tiap-tiap *Afdeeling* terdiri dari *Onder Afdeling* yang dikepalai seorang *Controler*. Tiap-tiap *Onder Afdeeling* terdapat margamarga. Setiap margamarga dikepalai Kepala margamarga (Pasirah). Sedangkan Ibukota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu distrik Seberang Ilir dan distrik Seberang Ulu dipimpin oleh seorang Demang (Panji, 2015).

C. Peran Elit Tradisional Dalam Kekuasaan Belanda di Sumatera Selatan

Keruntuhan Kesultanan Palembang oleh kekuasaan kolonial, menjadikan problem baru pada kekuasaan Belanda dalam mengembangkan wilayah jajahan baru. Pemerintah kolonial, mulai memberikan pengaruh pada elit-elit tradisional yang mau berpihak kepada Belanda. Taktik Belanda dengan memberikan kekayaan dan kekuasaan yang jauh lebih baik dari zaman Kesultanan Palembang, menjadikan elite tradisional banyak yang tertarik dan berpihak pada kekuasaan Belanda.

Karesidenan Palembang, sebagai pengganti dari Kesultanan Palembang, dipimpin seorang Residen dari kalangan Belanda sendiri. Wilayah Karesidenan Palembang yang luas, memberikan rasa keingintahuan bagi Belanda mengenai kekayaan alam peninggalan Kesultanan Palembang. Peran elite tradisional yang menunjukkan jalan kekuasaan yang luas, mampu memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda.

Sungai yang luas dan memiliki arus yang deras adalah jalan yang harus ditempuh untuk sampai pada wilayah pedalaman di Keresidenan Palembang. Sumatera tampaknya hanya diketahui oleh bangsa Eropa sejak abad ke-16. Lama setelah Hindu kemudian Arab membawa keyakinan dan peradaban mereka. Jejak

Hindu tetap tinggal dan dapat dilihat, terutama di bagian timur dan selatan pulau, sementara jejak Arab di bagian utara dan sepanjang pesisir timur. Ludovico di Varthema, orang yang pertama datang dari Eropa, disebut sebagai yang menemukan pantai Sumatera pada 1505. Diikuti oleh Portugis pada tahun 1509 dan, tahun 1599 diikuti Belanda yang tiba di pantai Aceh. Cornelis de Houtman, salah satu yang menemukan rute menuju Hindia Belanda.

Setelah secara bertahap memenangkan titik di pesisir Sumatera dan mengusir bangsa Portugis, sepanjang abad ke-18 Belanda harus berjuang menghadapi persaingan dengan bangsa Inggris. Sejak tahun 1824 setelah adanya perjanjian London (yang dikonfirmasi dan diperkuat pada tahun 1871), Inggris meninggalkan semua *klaim* atas Belitong dan seluruh Sumatera, sebagai imbalan atas semua kepemilikan Belanda yang tersisa pantai India dan Semenanjung Malaya bersama dengan Pulau Singapura (Susilo & Sarkowi, 2019).

Sumatera Selatan menghasilkan banyak bahan mentah yang berasal dari hasil bumi. Melihat kenyataan tersebut, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk dijadikan daerah industri yang lebih luas. Namun persoalannya, untuk dijadikan daerah industri tergantung pada faktor subyektif, yaitu adanya politik industrialisasi yang dijalankan Pemerintah Pusat untuk menilai daerah itu. Persoalan

tenaga buruh di Sumatera Selatan bukan menjadi kendala. Oleh karena masyarakat sendiri banyak yang berminat untuk menjadi buruh. Persoalan pembuatan basis industri di Sumatera Selatan bukan suatu perkara sulit. Mengalihkan perhatian dari masyarakat dagang ke masyarakat industri di Sumatera Selatan bukan hal yang perlu meminta perhatian khusus. Hal ini karena alam industri di Sumatera Selatan sudah terbentuk dengan baik sejak zaman dahulu. Terutama industri kecil seperti kerajinan tangan sudah ada sejak masa lalu.

Situasi ekonomi yang kelam bagi masyarakat Sumatera Selatan saat itu, dirasakan sebagai hal yang aneh. Karena jika dilihat, potensi ekonomi mereka cukup baik. Khususnya kondisi alam dan kesuburan tanah. Kondisi ekonomi memicu perselisihan. Media waktu itu menempatkan elit politik sebagai penanggung jawab atas kesulitan ekonomi yang terjadi (Santun, 2011). Penguasa penjajah harus memecah belah kelompok sosial, mencegah untuk menemukan kepentingan bersama dan membuat kehadiran orang Eropa terlihat wajar.

Mekanisme utama yang digunakan Belanda untuk mencapai hal tersebut, dengan melembagakan konsep ras yang telah jamak di seluruh masyarakat kolonial saat itu. Ide ini membuahkan hasil dengan mampu memecah sistem pemerintahan dan mengganti sistem kekuasaan raja dengan Karesidenan. Dalam kaitannya

dengan elit, masyarakat yang relatif heterogen mempunyai kecenderungan untuk memiliki elite yang beragam. Dapat dinyatakan bahwa hampir setiap cabang kehidupan mempunyai elitnya masing-masing. Hal ini dikarenakan sifat heterogenitas yang melekat pada masyarakat, pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan warga yang sangat bervariasi. Selain menjadikan hubungan antar anggota masyarakat menjadi semakin kompleks.

Dalam angka kemiskinan yang banyak ragam kebutuhan dan semakin tinggi kompleksitas hubungan antar warga, akan menjadikan setiap cabang kehidupan harus dikelola secara professional. Kondisi seperti ini menyebabkan seseorang makin kecil peluangnya, untuk melakukan peran sebagai elite pada banyak cabang kehidupan sekaligus. Sementara itu, seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan dan yang bersangkutan mampu memainkan peran yang menonjol, serta mempunyai pengaruh di bidang politik dapat dinyatakan sebagai elit dibidang politik, demikian seterusnya.

Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan adanya seseorang atau kelompok dengan keunggulan yang dimiliki mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar lebih dari satu cabang kehidupan. Dimungkinkan yang bersangkutan, selain menjadi elite di bidang ekonomi, juga menjadi elite

dibidang politik (Haryanto, 2005). Legitimasi terjadi karena kepatuhan masyarakat bukan karena diberikan oleh masyarakat. Wewenang pertama disahkan pada taraf kedua dan berkembang serta diakui oleh Negara, pemerintah atau lembaga politik. Bentuk kekuasaan terpusat dapat terjadi dengan atau tanpa penjajahan terhadap negara lain, dalam hal ada penjajahan masalah legitimasi menjadi rumit di tahap awal (Soekanto & Brotosusilo, 1987). Para pemimpin pribumi oleh Kolonial dijadikan pegawai pemerintah yang mendapatkan gaji per bulan. Namun para elite tradisional yang sebelum masa kekuasaan Belanda memperoleh hak istimewa, setelah kekuasaan pemerintah Kolonial, hak-hak istimewa tersebut dihapuskan.

Meskipun dijadikan pegawai pemerintah Belanda dengan sistem mendapat gaji, namun ada perbedaan pegawai pemerintah Belanda dengan penguasa pribumi. Sehingga sering menimbulkan kecemburuan sosial yang menyebabkan pertikaian penguasa pribumi dengan Belanda. Pemerintah Belanda menjadikan pegawai pemerintah bagi elite tradisional, hanya sebagai pemecah persatuan saja (Vickers, 2011).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian historis atau metode sejarah dengan menggunakan studi literatur dan

wawancara sebagai teknik penelitiannya. Peneliti mencoba untuk memaparkan berbagai langkah yang digunakan dalam mencari sumber, termasuk cara pengelolaan, analisis dan penulisannya. Pada bagian pertama akan dijelaskan metode dan teknik penulisan secara teoritis sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian (Gotchalk, 2008).

Terkait dengan pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Diantaranya pendekatan geografi dan geografi sosial, pendekatan sosiologi, pendekatan ekonomi, dan pendekatan ilmu politik. Dalam ilmu sejarah suatu peristiwa sangat tergantung dengan pendekatan yang digunakan, dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992). Adapun langkah-langkah Penelitian sebagai berikut:

A. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah teknik untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepustakaan, pengamatan langsung di lapangan atau *interview*. Pengambilan data penelitian historis, menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari hasil wawancara tokoh, foto dokumentasi dan dokumen pendukung lain. Sumber sekunder terdiri dari catatan

lapangan, buku, dan jurnal penelitian (Alian, 2012).

B. Verifikasi

Kritik sumber merupakan penulisan ilmiah yang bukan sembarang sumber, tetapi sumber itu terlebih dahulu harus di nilai melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern menilai, apakah sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan, apakah sumber itu asli, turunan atau palsu. Kata lain, kritik ekstern menilai keakuratan sumber. Kritik intern menilai kredibilitas data dalam sumber. Dalam penelitian ini lebih dahulu mempunyai prasangka terhadap sumber sejarah.

Peneliti sejarah mengejar kebenaran. Banyak sumber sejarah yang meragukan dan sengaja dipalsukan untuk mengecoh pendapat masyarakat. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang juga saksi sejarawan *Onder Afdeling* Rawas di Pulau Kidak, yaitu A. Ridwan Yahya (anak pejuang veteran masa pemerintahan Kolonial Belanda) dan Sukri di Kuto Tanjung yang merupakan saksi Sejarah (Abdurahman, 2010).

C. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan symbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi

berurutan). Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran makna fakta dan hubungan satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Jika dalam hal tertentu bersikap subyektif rasional jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

D. Historiografi

Setelah dilakukan proses *heuristik*, interpretasi, dan kritik sumber sebagai tahap akhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah rekonstruksi yang *imajinatif* dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Gootschalk, 2008). Penulisan sejarah disusun berdasarkan kronologis sesuai sistematika penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1995). Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis sejarah menuangkan data yang telah diinterpretasi ke dalam tulisan sejarah.

Penulisan laporan penelitian ini, penulis berusaha untuk menyusun dan menyajikan dalam bentuk sejarah sebagai kisah. Sehingga berbentuk tulisan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Penulisan penelitian sejarah nanti berdasarkan proses serialisasi terutama kronologis dan kausasi. Penyusunan laporan penelitian sejarah

secara kronologis penting agar peristiwa sejarah tidak tumpang tindih.

Hasil Dan Pembahasan

A. Onder Afdeling Rawas

Sistem pemerintahan kolonial banyak memberi dampak dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Banyak birokrasi yang berubah sesuai kehendak bangsa penjajah, yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya mendukung pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi era kerajaan. Meskipun terjadi pembaharuan sistem birokrasi pada pemerintahan kolonial, secara substansi sebenarnya tidak mengubah corak birokrasi pemerintah dalam berhubungan dengan publik.

Sentralisasi kekuasaan dalam birokrasi masih tetap dominan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pembuatan berbagai keputusan dan kebijakan publik oleh birokrasi pemerintah, tidak pernah bergeser dari penggunaan pola *top-down*. Substansi dari persoalan korupsi dalam birokrasi merupakan bagian dari feodalisme yang terus dipelihara oleh sistem birokrasi (Hasan, 2012). Di dalam yurisdiktif tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi. Salah satu perubahan *mindset* yang perlu dilakukan ialah pandangan birokrasi terhadap

kekuasaan yang cenderung menjadikan birokrasi sebagai kekuatan sakral. Kekuasaan pada birokrasi yang diwujudkan dalam jabatan pejabat bisa menakutkan dan jarang dapat ditembus oleh lapisan masyarakat. Cenderung lemah dihadapan kekuasaan birokrasi tersebut. Kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi menjadi sangat sakral (Mifta, 2010). Menurut Suwandi Syam (Wawancara 27 November 2018), mengatakan:

Onder Afdeling Rawas merupakan bagian wilayah penting pemerintahan Kolonial Belanda yang berkuasa atas wilayah Kesultanan Palembang. Untuk menjangkau *Onder Afdeling* Rawas, Belanda menyusuri sungai-sungai Rawas yang luas dan membuktikan bahwa Belanda telah menjadi penguasa di wilayah Sumatera bagian selatan. Setiap *Afdeling* dikepalai oleh Asistent Residen yang membawahi *Onder Afdeling* yang dikepalai *Controleur* (Kontrolir).

Setiap *Onder Afdeling* juga membawahi *Onder Distric* dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada *Afdeling Palembangische Boven Landen*. Wilayah *Onder Afdeling* Rawas ini dipimpin oleh seorang Asisten Residen Belanda yang membawahi wilayah-wilayah Kawedanan. *Onder Afdeling* Rawas merupakan daerah perkebunan dan banyak menggunakan perairan sungai rawas sebagai tempat transaksi penjualan barang dagangan.

Onder Afdeling Rawas dengan membawahi berbagai wilayah Kawedanan dan tunduk pada pemerintah kolonial. *Onder Afdeling* Rawas dapat memberi pengaruh saat kekuasaan Belanda yang sedang berkuasa dan rakyatnya. Perilaku

kepemimpinan dipahami sebagai kepribadian pemimpin yang diwujudkan dalam aktivitas kepemimpinannya. Kaitannya dengan mengelola tugas dan menjaga hubungan dengan bawahan atau masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sistem perkebunan yang menjadi prioritas perekonomian masyarakat di *Onder Afdeling* Rawas menjadi salah satu motivasi Belanda yang terus masuk ke wilayah ini. Di hal itu peran pemimpin yang memiliki jiwa handal dibutuhkan demi sebuah kemajuan.

Pemimpin yang memiliki *pamor* dalam memimpin dapat membawa kemajuan yang dibutuhkan dalam perkembangan wilayah (Julian Maramis & Raykevin Bagus, 2017). Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Penghargaan adalah bentuk pujian yang tidak berbentuk uang, sementara insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat kuantifikasi.

Peran membangkitkan semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan, bisa dilakukan melalui kata-kata, baik langsung maupun tidak langsung atau kalimat yang *sugestif*. Sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seorang pemimpin harus memberikan bimbingan yang tepat dan

simpatik kepada bawahan yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaan (Sashkin, Marshall & Sashkin, Molly G, 2002). *Onder Afdeling* Rawas merupakan ibukota Surulangun yang merupakan bagian wilayah kekuasaan Belanda pasca berakhirnya Kesultanan Palembang. *Onder Afdeling* Rawas sama dengan *Onder Afdeling* Musi Ulu, memiliki jalan raya yang dibangun zaman Belanda pada 1906, yang tersambung dari Palembang ke wilayah *Onder Afdeling* di Sumatera Selatan ini.

Wilayah *Onder Afdeling* Rawas juga mampu berkembang pesat di zaman Belanda. Perekonomian terus berkembang dengan baik, seperti perkebunan karet, sawit dan hasil bumi lain demi kemajuan masyarakat lokal. Sebagai konsekuensi dari terbentuknya *Afdeling* dan *Onder Afdeling* adalah mendirikan kantor pemerintahan serta membangun sarana dan prasarannya. Seperti, pusat pertokoan dan perbelanjaan, pusat pelayanan kesehatan, kantor pos, kantor polisi, peradilan, rumah tahanan, dan lain-lain.

Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tentu dibedakan antara kota *Afdeling* (setingkat Kabupaten) dengan kota *Onder Afdeling* (setingkat Kawedanan) (Suwandi, 2010). Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Surulangun banyak meninggalkan bekas dalam sejarah penjajahan Kolonial. Aliran sungai Rawas yang deras menjadi salah satu saksi dalam

perjalanan Belanda di Surulangun. Pemerintah Kolonial di Surulangun tidak banyak membangun, seperti kota-kota di Jawa. Basis kekuasaan Belanda di wilayah *Onder Afdeling* Rawas hanya sebatas menguasai kekayaan alam. Pada saat itu sangat melimpah untuk pembangunan negeri Belanda. Wilayah kekuasaan Belanda di *Onder Afdeling* Rawas berdekatan dengan wilayah kekuasaan Belanda yang lain. Pemerintah Kolonial berusaha mengeksploitasi kekayaan alam wilayah Keresidenan Palembang dengan sekuat-kuatnya, supaya kekuasaan Belanda tetap kokoh dan maju.

B. Perjuangan Masyarakat *Onder Afdeling* Rawas Dalam Melawan Bangsa Belanda

Kepentingan Kolonial atas wilayah *Onder Afdeling* Rawas dengan mengangkat beberapa pemimpin local sebagai tangan kanan Belanda dalam menerapkan pengaruhnya. Kebijakan Belanda kepada masyarakat di wilayah kekuasaannya, semua dilakukan demi kejayaan penjajahan Belanda selama berdiri di tanah Melayu, khususnya *Onder Afdeling* Rawas. Keberadaan perekonomian perkebunan yang strategis dan sumber energi dalam pengembangan pertambangan, menjadi alasan dalam penguasaan wilayah atas *Onder Afdeling* Rawas. Dukungan seorang pemimpin lokal yang dapat dipercaya Belanda, dapat memudahkan dalam kelangsungan keberhasilan kekuasaannya.

Maka, Belanda terus berupaya supaya kejayaannya tetap berlangsung dengan baik, dengan memilih tokoh masyarakat dalam membantu menjaga kekuasaannya. Memberikan jabatan dan pengaruh pada elite modern dalam masyarakat lokal lebih memudahkan bangsa Belanda. Untuk mengkoordinir wilayah kekuasaannya. Segala aspek yang menjadi penghalang Belanda segera teratasi tanpa melibatkan diri dalam kekuasaan di Indonesia. Menurut A. Ridwan Yahya (Wawancara, 25 November 2018), mengatakan:

Pada saat Belanda mendesak para pejuang TKR yang berada di Rejang Lebong, para pejuang TKR melarikan diri ke Pulau Kidak. Hal ini dipilih karena jalan yang dekat. Alasannya, Pulau Kidak Lama merupakan wilayah yang kurang diminati oleh Belanda. Para pejuang memilih pulau Kidak karena lebih dekat dari pelarian dari Rejang Lebong wilayah Bengkulu. Selain itu, sambutan nasionalisme masyarakat Pulau Kidak yang cinta tanah air dan menginginkan kemerdekaan atas wilayahnya, menjadi daya tarik para pejuang dalam menyusun strategisnya.

Saat Belanda memasuki wilayah Pulau Kidak dalam pencarian pejuang kemerdekaan, salah satu pejuang dan tokoh pejuang yang bernama Yahya yang berpangkat Letnan II Tetuler yang jabatannya merangkap Wakil Pesirah Ulu Rawas, dengan semangat memerangi Kolonial Belanda yang kemudian terkena pukulan bambu dengan keras sampai beliau pingsan.

Perjuangan dalam melawan penjajahan asing adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan Indonesia masa itu. Kebebasan dan kekayaan alam yang

direbut secara paksa oleh penjajah, mengharuskan pejuang kemerdekaan melakukan perlawanan. Tujuannya untuk mengembalikan jati diri bangsa dari belenggu penjajahan Belanda. Perlawanan rakyat dilakukan dengan semangat patriot yang luar biasa. Para pejuang kemerdekaan Indonesia banyak mengorbankan harta dan nyawanya sendiri demi berjuang tiada henti-hentinya.

Belanda yang menerima perlawanan ini, berusaha meredam semangat juang para pejuang bangsa Indonesia. Namun perlawanan tetap berkobar dimana saja. Masa perjuangan banyak pejuang *Onder Afdeling* Rawas berasal dari Pulau Kidak. Mereka berjuang atas nama bangsa yang telah dirampas kemerdekaan oleh Belanda. Belanda memilih Pulau Kidak sebagai perumahan para petinggi Belanda. Oleh karena wilayahnya yang strategis yang berdekatan dengan Bengkulu yang dapat dilalui di Muara Aman dan Jambi yang saat itu melalui jalan setapak.

Belanda menjadikan Surulangun sebagai basis pemerintahan. Namun untuk perumahan mereka memilih Pulau Kidak sebagai tempat beristirahat untuk bermukim. Daerah Pulau Kidak menjadi penting dalam perjalanan penjajahan Belanda. Selain para pejuang yang memilih Pulau Kidak sebagai tempat bersembunyi dan menyusun rencana pergerakan. Namun Belanda sendiri juga menjadikan sebagai

tempat bermukim selama menguasai *Onder Afdeling* Rawas. Menurut Ahmad Syukri (Wawancara, 26 November 2018), menyatakan:

Sering ada pejuang yang berada di Pulau Kidak, mereka melarikan diri dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, karena terdesak oleh Belanda yang terus melakukan kekerasan. Bangsa Belanda sendiri sebenarnya juga berada di Pulau Kidak untuk bermukim. Namun rakyat Pulau Kidak sangat menjaga kerahasiaan para pejuang, sehingga Belanda tidak mengetahui keberadaan pejuang Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia di nilai sangat berat di musim kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang dengan tenaga terbatas saat melawan bangsa Belanda, yang memiliki kemampuan senjata yang serba modern.

Kemampuan untuk menyatukan aspek-aspek manusia menjadi kesulitan tersendiri dalam birokrasi publik dan pimpinan harus dapat membuat bawahan. Supaya mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja demi mencapai tujuan organisasi birokrasi publik. Dalam birokrasi yang *good governance* perlu penerapan model motivasi yang mampu semaksimal mungkin untuk memberikan inspirasi kepada pegawai.

Dalam hal ini internalisasi nilai-nilai disiplin, ketekunan, ketelitian dan semangat perlu mendapatkan penekanan khusus. Pimpinan birokrasi seharusnya dapat memberikan inspirasi melalui keteladanan yang baik. Misalnya, perilaku serius dalam bekerja, semangat yang tinggi,

perilaku efektif, perilaku yang konsisten dan etos kerja tinggi. Hal yang demikian ini dapat memiliki *multiplier effect* terhadap motivasi pegawai (Pasolong & Harbani, 2008). Menjelang masa revolusi Indonesia, Surulangun juga bergejolak. Wilayah Surulangun berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Kebanyakan pejuang dari Palembang, Lubuklinggau banyak melarikan diri ke wilayah *Onder Afdeling* Rawas.

Para pejuang dari berbagai laskar di Sumatera Selatan berjuang bersama rakyat Surulangun melawan penjajah yang telah merampas hak kemerdekaannya. Gejolak perjuangan kemerdekaan bukan hanya di Surulangun, namun juga di wilayah terdekat lain, seperti Kawedanan Rupit Rawas. Wilayah Kawedanan Rupit Rawas menjadi basis perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan Belanda. Sehingga sering peluru Belanda menembus dinding rumah tempat pejuang berlindung dari peluru.

Perjuangan melawan penjajah berkobar di mana-mana. Di Surulangun sendiri menjadi pelarian pejuang dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Di Surulangun para pejuang ini bersama rakyat pribumi menyusun rencana penyerangan Belanda. Perjuangan masyarakat Surulangun akhirnya berhenti tatkala penjajah baru datang dan mengusir penjajah Belanda di Nusantara. Para penjajah baru ini adalah bangsa Jepang. Dengan propaganda berusaha untuk

menguasai Nusantara dengan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural dan religius yang saling berinteraksi. Oleh karena, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dianggap gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang menjelaskan motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.

Makna Sejarah Pergerakan Nasional berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Proses perjuangan Pergerakan Nasional Indonesia tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka dan di jiwai semangat persatuan dan kesatuan. Sehingga melahirkan semangat kebangkitan nasional. Selain itu pula untuk menanamkan semangat patriotisme dan kesadaran nasional sehingga semangat kemerdekaan bisa diraih dan dipertahankan (Yudi Hartono, 2017).

Maka sebuah pergerakan yang menginginkan kebebasan merupakan hak yang selalu ditempuh bagi Indonesia. Perlu waktu lebih dari empat tahun sejak kemerdekaan diproklamasikan pada 1945 untuk penyerahan kedaulatan dari Belanda. Bahkan banyak orang Indonesia yang tidak puas dengan hasilnya. Mengingat keberhasilan Belanda dalam menekan gerakan kaum nasionalisme di Indonesia. Oleh sebab negara ini tidak akan terwujud tanpa campur tangan Jepang. Jepang

mendorong dan menyebut sentimen nasionalis, menciptakan lembaga baru seperti organisasi lingkungan lokal dan memberikan tempat bagi para pemimpin politik, seperti Soekarno. Tetapi pada saat yang sama menghancurkan banyak hal yang telah dibangun oleh Belanda. Kombinasi nasionalisme dan kehancuran penting bagi revolusi di akhir Perang Dunia II. Pada 9 Maret 1942 pemerintah Kolonial Belanda menyerah kepada pihak Jepang (Vickers, 2005).

Penutup

Kesimpulan

Onder Afdeling Rawas merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Selatan. Wilayah ini merupakan bagian Karesidenan Palembang pasca ditaklukan Kesultanan Palembang oleh Belanda. *Onder Afdeling* Rawas merupakan ibu kota dari Surulangun. Kemudian menjadi distrik wilayah yang memiliki pengaruh dalam kesuksesan Belanda selama menjajah. *Onder Afdeling* Rawas sendiri dipimpin *Controleur* yang dibantu pemimpin lokal yang sengaja diangkat Kolonial.

Para elit modern Indonesia memang sengaja diberi kekuasaan oleh Belanda untuk mempermudah dalam mempengaruhi rakyat. Elite modern yang condong ke pihak Kolonial, mampu menyakinkan rakyat untuk menuruti kemauan bangsa asing. Untuk menanam

berbagai tanaman yang laku di pasar internasional. Hasilnya banyak rakyat yang jatuh miskin dan mengalami ketidakadilan Belanda. Dalam perjalanan sejarah, para pejuang di *Onder Afdeling* Surulangun terus melakukan berbagai perlawanan melawan Belanda. Bahkan wilayah ini menjadi pelarian bangsa Indonesia yang menderita kekalahan dari Belanda.

Wilayah di *Onder Afdeling* Rawas banyak dijadikan daerah pelarian pejuang untuk menata strategi melawan penjajah. Daerah Pulau Kidak pernah menjadi basis pelarian pejuang di daerah Rejang Lebong dan Bengkulu. Sebab wilayahnya lebih dekat dan tidak terdeteksi penjajah. Perjuangan rakyat *Onder Afdeling* Rawas di Surulangun telah menjadi masa perjuangan yang penuh sejarah dalam masa Sejarah Pergerakan Nasional.

Daftar Pustaka

- Abadi, L. (2009). *Muatan Lokal Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Indonesia Raya Sejarah Nasional Indonesia 8*. Jakarta: PT Lentera Abadi.
- Abdurahman. (2010). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Agus Susilo & Sarkowi. (2019). *Perkembangan Surulangun Pada Masa Onder Afdeling Rawas*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Ahmadin. (2008). Masalah Angraria di Indonesia Masa Kolonial. In *Jurnal Attoriolong*.
- Andrian Vickers. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Cabaton, A. (2015). *Jawa, Sumatera & Kepulauan Lain di Hindia Belanda*. Yogyakarta: Ombak.
- Gottschalk, L. (n.d.). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harbani Pasalong. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hartono, Y. (2017). Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(2), 84-102. <http://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1491>
- Haryanto. (2010). *Kekuasaan Elit Suatu Bahasa Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana PLOD Daerah Universitas Gajah Mada.
- Hendratta, A. O. (2013). *Peradaban di Pantai Barat Sumatera Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*. Yogyakarta: Ombak.
- Julian Marawis, R. B. (2018). *Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung*. Universitas Katolik Parahyangan FISIP Prodi Ilmu Administrasi Publik.
- Kuntowijoyo. (1994). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Makkelo, I. D. (2018). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2), 83-101. <https://doi.org/10.34050/JLB.V12I2.3052>
- Marshall Sashkin & Molly G. Sashkin. (2002). *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan, terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Mifta Thoha. (2010). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nizwar Abu Nain. (2011). *Angkatan 66 Dalam Lintas Sejarah: Meluruskan History Bangsa Demi Generasi*. Jakarta: Cipro Media.
- Nur Hasan. (2012). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum*, XXVII(2), 1086.
- Purnawan Basundoro. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.

- Resti Eka Prastiwi, Ufi Saraswati, dan N. W. (2019). Sejarah Perkembangan Arsitektur Bangunan Indis di Purworejo Tahun 1913-1942. *Journal of Indonesian History*, 8(1), 89.
- Robert Van Niel. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Safitri. (2017). *Kota, Sejarah Perekonomian Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M*. UIN Raden Fatah.
- Sair, A. (2012). *Metodologi Sejarah Dan Histiografi*. Palembang: Proyek SP4 Universitas Sriwijaya.
- Santun Muhammad & Dedi Irwanto. (2011). *Venesia dari Timur Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Syuhada, Supian, dan R. S. (2017). Sejarah Kota Modern Masa Kolonial Belanda: Studi Kasus Kota Tua Di Muaro Tembesi Batang Hari. *Jurnal Titian*, 1(2), 175.
- Soekanto & Brotosusilo. (1987). *Sosialisasi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Supriyanto. (2013). *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Ombak.
- Suriana, K. A. P. & S. (n.d.). *Sejarah Keresidenan Palembang*. Universitas PGRI Palembang.
- Susilo, Y. I. & A. (2018). *Pangeran Asir dan Kepemimpinan Rupit Rawas*. Medan: Harapan Cerdas.
- Suwandi Syam. (2010). *Sejarah Museum SubkossGaruda Sriwijaya di Lubuklinggau*. Lubuklinggau: Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya Perwakilan Lubuklinggau.